

**Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Dalam Mewujudkan
Pemerataan Mutu Pendidikan Di Indonesia****Nur Atik Azkiyah**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

azkiyah.atik@gmail.com

Abd Rozak

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

abd.rozak@uinjkt.ac.id

Pendidikan merupakan pondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa, namun di Indonesia, disparitas mutu pendidikan masih menjadi tantangan serius, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta daerah maju dan terpencil. Kesenjangan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, distribusi guru yang tidak merata, kualitas pelatihan guru yang bervariasi, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kebijakan Kurikulum Merdeka, dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik, serta memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Kurikulum Merdeka dapat berperan dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan implementasi dan memberikan rekomendasi strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka atau literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan. Tantangan utama meliputi ketimpangan kesiapan antar wilayah, di mana sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) kesulitan mengakses sumber daya, pelatihan guru, dan fasilitas teknologi. Kualitas dan kesiapan guru yang bervariasi, serta beban administratif, juga menghambat peran optimal. Fleksibilitas kurikulum, yang seharusnya menjadi keunggulan, justru menimbulkan kebingungan bagi guru akibat minimnya pedoman teknis yang rinci. Selain itu, evaluasi kebijakan yang bersifat umum tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan lemahnya keterlibatan pemerintah daerah semakin memperparah masalah pemerataan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen lintas sektor, pemerataan sumber daya, dan reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Kurikulum merdeka, Pemerataan mutu Pendidikan**Abstrak**

Education is the main foundation for the progress of a nation, but in Indonesia, disparities in the quality of education are still a serious challenge, especially between urban and rural areas, as well as developed and remote areas. This gap is caused by limited infrastructure, uneven distribution of teachers, varying quality of teacher training, and the relevance of the curriculum to local needs. To overcome this problem, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology launched the Independent Curriculum Policy, with the aim of creating more flexible, relevant, and student-centered learning, as well as providing greater autonomy to educational units. This article aims to analyze how the Independent Curriculum policy can play a role in realizing equitable quality of education in Indonesia, as well as identify implementation challenges and provide strategic recommendations. This study uses a qualitative method with literature review. The results of the study show that the implementation of the Independent Curriculum faces various challenges in realizing equitable quality of education. Key challenges include inequalities in readiness between regions, where schools in 3T (disadvantaged, frontier, outermost) areas struggle to access resources, teacher training, and technology facilities. The varying quality and readiness of teachers, as well as the administrative burden, also hinder optimal roles. The flexibility of the curriculum, which should be an advantage, actually causes confusion for teachers due to the lack of detailed technical guidelines. In addition, general policy evaluation without considering the local context and weak involvement of local governments further exacerbates the problem of equity. Therefore, cross-sectoral commitment, equitable distribution of resources, and comprehensive reform of the education system are needed to achieve equitable distribution of the quality of education.

Keywords: Independent curriculum, Equitable quality of education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan pemerataan akses serta kualitas telah menjadi prioritas nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas mutu pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah di daerah maju dan daerah terpencil. Disparitas antar wilayah menjadi hambatan serius. Banyak daerah, terutama yang terpencil, mengalami keterbatasan dalam infrastruktur pendidikan dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Selain itu, kebijakan nasional yang bersifat umum seringkali sulit diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antar daerah menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas Pendidikan (Nasir, Mahmudinata, Ulya, & Firdaus, 2023). Kesenjangan ini tidak hanya tercermin dari fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran, kompetensi guru, dan hasil belajar peserta didik (Berliana, Hamidah, & Jasmi, 2024).

Pemerataan pendidikan, dalam esensinya, adalah sebuah imperatif untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau budaya, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Ini bukan sekadar masalah penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, relevan, dan memberdayakan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, yang mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional dan kemajuan peradaban (Dzaky Satria, Ihsan Utama Kusasih, & Gusmaneli Gusmaneli, 2025). Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada sebuah lembaga pendidik, maka dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemerataan pendidikan antara pedesaan dan perkotaan. Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan dengan berbagai cara tanpa harus dibatasi oleh ruang belajar, waktu belajar, dan tempat belajar (Patandung & Panggua, 2022). Permasalahan pemerataan mutu pendidikan menjadi krusial karena berdampak langsung pada kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara optimal bagi pembangunan bangsa.

Kesenjangan mutu pendidikan ini seringkali berakar pada berbagai faktor seperti kurikulum yang terus berkembang sehingga mempengaruhi kendala dalam hal infrastruktur, ketimpangan antara daerah urban dan pedesaan, distribusi guru yang tidak merata, kualitas pelatihan guru yang bervariasi, ketersediaan sumber daya belajar yang terbatas, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal (Dewi, Sari, Rahayu, & Sukarmin, 2025; Sukodoyo, Dewi, & Sari, 2025). Akibatnya, lulusan dari daerah

dengan mutu pendidikan rendah seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam persaingan di dunia kerja maupun dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meluncurkan berbagai inisiatif strategis, salah satunya adalah Kebijakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai respons terhadap tantangan pendidikan di era disrupsi, dengan tujuan utama untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik (Said & Aqodiah, 2024). Filosofi di balik kurikulum ini adalah memberikan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta konteks lokal. Harapannya, dengan fleksibilitas ini, sekolah-sekolah di berbagai daerah dapat beradaptasi lebih baik dan menyediakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, sehingga secara bertahap dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan.

Kebijakan Kurikulum Merdeka diyakini memiliki potensi untuk menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan penekanan pada pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kebebasan guru dalam berinovasi, kurikulum ini diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman latar belakang peserta didik dan konteks sekolah. Namun, implementasi kebijakan sebesar ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan (Gunawan & Bahari, 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Misalnya, studi oleh (Munawar, 2022) menyatakan bahwa Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka lebih efektif dibandingkan Kurikulum 2013 dalam mengatasi krisis pembelajaran yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini terbukti mampu mengurangi learning loss secara signifikan, memberi keleluasaan kepada guru dan siswa dalam proses belajar, serta mendorong pembelajaran yang lebih bermakna melalui pendekatan berbasis proyek dan diferensiasi. Selain itu, fleksibilitas struktur dan fokus pada capaian pembelajaran menjadikan Kurikulum Merdeka lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan abad ke-21 di Indonesia. Sementara itu, Penelitian berfokus pada wilayah Kecamatan Long Hubung di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang merupakan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ditekankan

bahwa keterbatasan akses, fasilitas, infrastruktur jalan, dan teknologi merupakan tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah ini. Hal ini menyebabkan kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan perkotaan

Penelitian oleh (Nabila, Habibah, Humaira, Mutmainah, & Ayu, 2025) Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Pengembangan 9 menghadapi tantangan berupa kesenjangan partisipasi siswa, keterbatasan fasilitas teknologi, dan minimnya pendanaan kegiatan P5. Meski demikian, strategi seperti pembelajaran berdiferensiasi, pemanfaatan teknologi secara maksimal, dan optimalisasi dana BOS mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum secara bertahap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ansari, 2022) menyebutkan bahwa Kurikulum Merdeka disebut sebagai solusi afirmatif untuk pemerataan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) melalui fleksibilitas, kemandirian siswa, dan kebebasan dalam pembelajaran

Oleh karena itu, perlunya dilakukan kajian analitis mengenai bagaimana kebijakan Kurikulum Merdeka dapat berperan dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. analisis mendalam terhadap efektivitas kebijakan Kurikulum Merdeka dalam mencapai tujuan pemerataan mutu pendidikan menjadi sangat relevan dan mendesak. artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan Kurikulum Merdeka dari perspektif pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Penulis ingin mengkaji sejauh mana kebijakan ini telah, sedang, dan dapat berkontribusi terhadap pengurangan disparitas mutu pendidikan antardaerah dan antar satuan pendidikan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi dan memberikan rekomendasi strategis agar Kurikulum Merdeka benar-benar dapat menjadi instrumen pemerataan pendidikan yang efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka atau *literature review*. Studi pustaka berisikan tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti tidak hanya menyusun penelitian-penelitian tersebut menjadi satu tumpukan studi pustaka, akan tetapi peneliti mendiskusikan atau menghubungkannya dengan topik penelitian yang akan dilakukan (Grashinta dkk., 2023). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui literature review dengan menelaah beberapa artikel, buku dan laporan penelitian yang relevan dengan tema. Sumber penelitian dikumpulkan dari database akademik seperti google scholar, sinta dll, baik dalam Bahasa

Indonesia maupun Bahasa Inggris yang berkaitan dengan topik. Kemudian analisis data dilakukan secara tematik, melalui proses identifikasi, reduksi dan pengelompokan tema agar diperoleh sintesis hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar penarikan Kesimpulan dan identifikasi kesenjangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang berpotensi diterapkan sebagai motor penggerak dalam pemerataan mutu pendidikan di Indonesia karena memiliki fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan siswa, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengajaran. Namun, dalam implementasinya kurikulum merdeka di Indonesia memiliki banyak tantangan. Tantangan utama dalam implementasi kurikulum merdeka adalah ketimpangan kesiapan antar wilayah sebagaimana dalam (Berliana dkk., 2024; Maulidin & Nawawi, 2025). Wilayah perkotaan memiliki kecenderungan sekolah dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pelatihan guru, dan fasilitas pendukung teknologi. Sebaliknya, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sering kali mengalami hambatan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka secara optimal.

Kurikulum Merdeka menuntut kreativitas guru dalam menyusun modul ajar, menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek, dan menerapkan asesmen formatif. Namun, kenyataannya di daerah terpencil guru-guru belum mendapatkan pelatihan yang mumpuni dalam menghadapi keterbatasan bahan ajar dan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh kesiapan para pelaksananya. Ketika pelaksana kebijakan (dalam hal ini guru dan kepala sekolah) tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup, maka tujuan kebijakan sulit tercapai. Dalam konteks ini, kebijakan Kurikulum Merdeka dapat dikritisi sebagai kebijakan yang terlalu “optimis” tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan disparitas sumber daya yang sangat besar antar wilayah di Indonesia.

Kurikulum Merdeka mengandalkan penggunaan teknologi informasi, terutama melalui platform digital seperti halnya Platform Merdeka Mengajar. Adapun akses terhadap teknologi tersebut tidak merata (Anita & Astuti, 2022). Bahkan, terdapat sekolah-sekolah yang belum memiliki

listrik secara stabil atau bahkan belum teraliri listrik (Ambo & Mahmudah, 2023). Ketimpangan ini berdampak langsung pada ketidakmerataan akses terhadap sumber belajar, pelatihan guru, dan materi kurikulum. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan teknis bagi tenaga kependidikan dalam mengoperasikan perangkat digital yang disediakan. Tanpa penyelesaian masalah infrastruktur, implementasi Kurikulum Merdeka hanya akan efektif di sebagian kecil wilayah Indonesia yang sudah maju.

Dalam laporan UNESCO (2020) mengenai pendidikan menyatakan bahwa kesenjangan pembelajaran akan muncul akibat digitalisasi pendidikan tanpa pemerataan infrastruktur yang baik (Wang, Zhang, Sesunan, & Yolanda, 2023). Hal ini tampak nyata dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang di satu sisi menawarkan kebebasan dalam pengembangan kurikulum, tetapi di sisi lain menciptakan jurang baru antara sekolah yang terhubung dengan dunia digital dan yang tidak.

Keberhasilan implementasi kurikulum merdeka juga dipengaruhi oleh kualitas dan kesiapan guru. Guru dituntut untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif dan reflektif dalam implementasi kurikulum merdeka (Melisa, 2024). Sayangnya, pelatihan atau bimbingan teknis yang cukup dalam memahami filosofi dan strategi pembelajaran Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya dimiliki oleh para guru. Kompetensi guru ini memperkuat kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah. Di samping itu, beban administratif yang tinggi dan ketidakpastian sistem penilaian berbasis proyek membuat guru kesulitan menjalankan peran ideal mereka. Alokasi anggaran khusus dan mendesain sistem pelatihan yang berkelanjutan perlu dilakukan oleh pemerintah agar kompetensi guru merata di seluruh wilayah.

Fleksibilitas kurikulum yang seharusnya menjadi keunggulan justru menjadi tantangan tersendiri. Terbatasnya waktu dan minimnya pedoman teknis yang sangat rinci menjadikan guru bingung dalam penyusunan modul ajar (Anam, Utami, Khotimah, & Marzuqi, 2023; Putra dkk., 2025). Pendampingan yang intensif diperlukan agar tidak adanya kesenjangan antar satuan pendidikan dalam upaya fleksibilitas. Bahkan beberapa sekolah memilih untuk tetap menggunakan kurikulum sebelumnya karena merasa tidak siap dengan tuntutan baru yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan perlunya roadmap implementasi yang jelas dan terukur agar tidak menimbulkan kebingungan massal di kalangan pendidik.

Keberagaman konteks budaya, sosial, dan geografis di Indonesia menuntut adanya indikator keberhasilan yang lebih kontekstual. Dalam proses evaluasi implementasi kurikulum bersifat umum dan belum mempertimbangkan kondisi lokal pada masing-masing daerah. Evaluasi yang bersifat umum ini akan berpotensi menciptakan penilaian yang tidak adil bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Misalnya, sekolah di daerah konflik atau bencana memerlukan pendekatan penilaian yang berbeda dibandingkan sekolah di kota besar (Fauzi dkk., 2024). Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis konteks lokal yang didukung data real-time dan masukan dari aktor pendidikan di lapangan.

Keterlibatan pemerintah daerah yang lemah bisa menjadi hambatan struktural dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Padahal, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam urusan pendidikan. Namun, kenyataannya banyak daerah yang belum mengalokasikan anggaran atau kebijakan pendukung untuk memperkuat implementasi kurikulum ini di wilayah mereka (Irawan & Yunitasari, 2025). Pemerintah pusat juga belum optimal dalam mendorong kolaborasi lintas sektor dan lembaga antara pusat-daerah-sekolah. Seharusnya ada mekanisme sinergi kebijakan yang menekankan peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penggerak pendidikan di wilayahnya.

Meskipun terdapat banyak praktik baik dari sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan Kurikulum Merdeka, belum ada mekanisme sistematis untuk mendokumentasikan dan replikasinya. Hal ini menyebabkan potensi kolaborasi dan pembelajaran antar sekolah belum dimanfaatkan secara optimal. Replikasi praktik baik bisa menjadi solusi efektif untuk pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah seharusnya membangun basis data nasional yang berisi praktik inovatif dari sekolah-sekolah di berbagai konteks wilayah. Selain itu, pengembangan komunitas belajar antar sekolah lintas daerah dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan.

Pendekatan kebijakan yang terlalu terpusat tanpa mempertimbangkan dinamika lokal menjadi faktor penghambat. Tilaar (2002) menyatakan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah. Kebijakan yang bersifat top-down tanpa mengakomodasi kebutuhan lokal hanya akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Pemerintah perlu mendorong penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) berbasis karakteristik daerah, budaya lokal, dan aspirasi masyarakat. Hal ini juga perlu diperkuat dengan otonomi yang diimbangi dengan akuntabilitas yang jelas, baik dari sisi kinerja akademik maupun manajerial.

Dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan melalui Kurikulum Merdeka, kebijakan afirmatif dan konseptual sangat diperlukan. Pemerintah pusat perlu bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, komunitas sekolah, dan lembaga pelatihan untuk memperkuat kapasitas lokal. Tanpa komitmen kolektif ini, Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi kebijakan yang gagal menjangkau akar persoalan pendidikan di Indonesia. Intervensi khusus seperti program afirmasi guru daerah, distribusi perangkat TIK yang merata, dan penguatan supervisi berbasis daerah harus menjadi bagian dari agenda strategis pendidikan nasional.

Evaluasi dan revisi kebijakan harus dilakukan secara berkala berdasarkan data empiris yang valid. Pemerintah perlu menyediakan ruang dialog terbuka antara pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan kurikulum yang benar-benar transformatif dan adil. Kurikulum bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membentuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, implementasinya harus didukung oleh sistem pendidikan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada keadilan sosial.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi kurikulum merdeka yang telah diterapkan di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antar wilayah. Wilayah yang berada di perkotaan akan lebih maju dalam hal teknologi kesiapan guru, dll. Sedangkan di wilayah yang berada di area terpencil khususnya di area 3T yang bahkan belum teraliri listrik tidak bisa mengakses teknologi. Hal ini menimbulkan ketidak merataan implementasi kurikulum. Penerapan kurikulum merdeka yang seharusnya dapat menjadi motor pemerataan mutu pendidikan di Indonesia, Tapi kenyataannya masih terdapat ketimpangan mutu. Dalam mencapai keberhasilan implementasi kurikulum sangatlah bergantung pada kesiapan antar wilayah, kesiapan dan kompetensi guru, pemerataan sumber daya dan kebijakan untuk mereformasi sistem pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan evaluasi bertahap agar terciptanya mutu pendidikan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambo, N., & Mahmudah, F. N. (2023). Implementasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer. *Journal Of Educational Administration and Leadership*, 4(2), 46–52. <https://doi.org/10.24036/Jeal.V4i2.465>
- Anam, M. M., Utami, W. S., Khotimah, K., & Marzuqi, M. I. (2023). Persepsi Guru Mata Pelajaran Ips Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Smp Sidoarjo. *Jurnal Dialektika Pendidikan Ips*, 3(3), 20–35. <https://doi.org/10.26740/penips.V3i3.56021>
- Anita, A., & Astuti, S. I. (2022). Digitalisasi Dan Ketimpangan Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Baraka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/jpnk.V7i1.2509>
- Ansari, A. H. (2022). Konsep Dan Rancangan Manajemen Kurikulum Merdeka Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Tugas Mata Kuliah Mahasiswa*, 1(1).
- Berliana, N., Hamidah, N. I. F., & Jasmi, R. A. (2024). Tantangan Dan Solusi Pendidikan Di Daerah Terpencil: Studi Kasus Di Desa Cisampang. *Prestise*, 4(2).
- Dewi, R. K., Sari, A. F., Rahayu, S. S., & Sukarmin. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan Dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1).
- Dzaky Satria, Ihsan Utama Kusasih, & Gusmaneli Gusmaneli. (2025). Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Saat Ini: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 292–309. <https://doi.org/10.55606/jubpi.V3i2.3838>
- Fauzi, M. S., Maq, M. M., Rukmini, A., Arsyad, M., Prayogi, A., & Ahyani, E. (2024). Kurikulum Merdeka Dalam Kerangka Akses Pendidikan: Tinjauan Literatur Atas Inisiatif Unicef Dan Pemerintah Indonesia. *Ejpp*, 4(2).
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Problematika Kurikulum Merdeka Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional (Study Literatur). *Journal Of Human and Education (Jahe)*, 4(4), 178–187. <https://doi.org/10.31004/jh.V4i4.1191>
- Irawan, A., & Yunitasari, F. (2025). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Merauke. *Jakd*, 4(1).
- Maulidin, S., & Nawawi, M. L. (2025). Studi Literatur: Transformasi Kurikulum Pendidikan

- Agama Islam Dalam Konteks Merdeka Belajar. *Educator*, 5(1).
- Melisa. (2024). Analisis Kesiapan Guru Dalam Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Pembelajaran Kurikulum Merdeka. *Al-Miskawaih*, 3(1).
- Munawar. (2022). Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, 15(2).
- Nabila, A., Habibah, N., Humaira, N. N., Mutmainah, S., & Ayu, D. (2025). Strategi Mengatasi Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sdn Pengambangan 9: Perspektif Kesenjangan Siswa, Fasilitas Teknologi, Dan Pendanaan Kegiatan. 3(2).
- Nasir, M., Mahmudinata, A. A., Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi Pemberdayaan Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pendidikan. 1(2).
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan Dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2).
- Putra, I. S., Amanda, C. T., Harmuli, S., Andini, H., Anggi, N., & Sofwan, M. (2025). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Guru Dalam Penggunaan Modul Ajar. *Pendas*, 10(1).
- Said, K. & Aqodiah. (2024). Kurikulum Merdeka: Langkah Menuju Pendidikan Yang Berfokus Pada Kreativitas Dan Kemandirian di Sekolah Dasar Negeri. *Ibtida'iy*, 9(2).
- Sukodoyo, Dewi, R. K., & Sari, A. F. (2025). Pokok Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(1), 282–294. <https://doi.org/10.55606/Jubpi.V3i1.3602>
- Wang, C., Zhang, M., Sesunan, A., & Yolanda, L. (2023). Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Indonesia. *Kemendikbud*.